

**IMPLEMENTASI STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH
KEPALA SDN SE KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN**

ARTIKEL PENELITIAN

OLEH :

U. MAULUDDIN
NIM F10211051



**PROGRAM STUDI 2- PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2014**

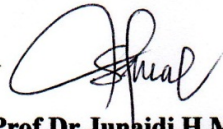
**IMPLEMENTASI STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH
KEPALA SDN SE KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN**

ARTIKEL PENELITIAN

U. MAULUDDIN
NIM F10211051

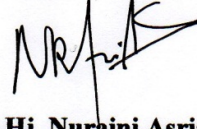
Disetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Junaidi H. Matsum, M.Pd
NIP. 19560307 198703 1001

Pembimbing II



Dr. Hj. Nuraini Asriati, M.Si
NIP. 19631003 198903 2003

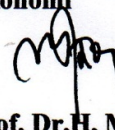
Mengetahui,

Dekan FKIP



Dr. H. Martono, M.Pd
NIP. 19560307 198703 1001

**Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Pendidikan
Ekonomi**



Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd
NIP. 19560606 198703 1 002

IMPLEMENTASI STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH KEPALA SDN SE KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN

U.Mauluddin,Junaidi H.Matsum, Nuraini Asriati

Program Studi S-2 Pendidikan Ekonomi,FKIP Untan, Pontianak

Email :uptdisdikseiraya@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar pembiayaan pendidikan oleh kepala Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian survey. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Sungai Raya, SDN 14 Persak, SDN 2 Sungai Keran, SDN 16 Batu Payung, SDN 6 Pulau Lemukutan, dan SDN 11 Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, Data diperoleh melalui angket, telaah dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan melalui 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi sekolah yaitu 1) belum berjalannya manajemen berbasis sekolah terutama di sekolah yang belum terakreditasi sehingga berdampak pada pengelolaan biaya pendidikan, 2) masih kurangnya pelatihan bagi pengelola keuangan sekolah (bendahara sekolah) tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan sehingga pembukuan keuangan sekolah belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. dan 3) komite sekolah kurang berperan aktif dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan

Kata kunci: Pelaksanaan, Pembiayaan Pendidikan

***Abstract:** This study aims to determine the default implementation of education financing by the head of the State Primary School at Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang and factors which become obstacles in the management of education funding. This study is a survey research. This research was conducted at SDN 1 Sungai raya, SDN 14 Persak, SDN 2 Sungai Keran, SDN 16 Batu Payung, SDN 6 Pulau Lemukutan, and SDN 11 Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. The data source of this research is head master. Data were obtained through questionnaires, review of documentation, and interviews. Data analysis was performed through three flow of activities of data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study showed that the implementation of management education funding has a enough good category. Problems in the school, namely 1) has not progressed the school-based management (SBM), especially in schools that have not been accredited so the impact on cost management education, 2) the lack of training for financial management of the school (the school treasurer) on the management of the education funding so that school financial records have not been accordance with established standards. and 3) lack of school committees play an active role in the management of education financing.*

Keywords: Implementation, Education Funding

Pendidikan merupakan sebuah tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Indonesia. Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pendidikan yaitu melalui program wajib belajar sembilan tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Program ini menargetkan semua warga negara Indonesia harus memiliki pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik.

Peningkatan layanan dan mutu pendidikan harus mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya peningkatan layanan dan mutu pendidikan tidak terlepas dari pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Supriadi (2006) menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah, terlaksananya aktivitas sekolah (intra dan ekstra), dan dapat mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Fatah (1999) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya dalam menyediakan komponen-komponen input pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu proses, maka input yang bermutu akan membuat proses belajar mengajar yang bermutu, dan pada gilirannya akan membuat hasil belajar lebih baik. Sejalan dengan itu, hasil penelitian yang dilakukan Syamsudin (2009) menunjukkan bahwa biaya pendidikan berpengaruh terhadap mutu hasil belajar melalui mutu proses belajar mengajar.

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan betapa pentingnya peranan biaya pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan berjalan lancar apabila didukung oleh dana yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk pembiayaan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Pembiayaan adalah standar yang membiayai proses belajar mengajar siswa selama satu tahun.

Dari uraian di atas jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan berjalan dengan baik jika biaya investasi, biaya operasional non personal, dan biaya personal terpenuhi dengan baik. Pemenuhan biaya pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Bab I pasal 2 ayat (1) "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat".

Pengalokasian dana pendidikan sebesar 20 % dari APBN dan APBD merupakan salah satu program pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 80 bahwa “anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara serta pasal 81 “anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja daerah”. Pemenuhan biaya pendidikan ini tidak serta merta memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan jika tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik.

Permasalahan yang masih dialami sekolah/tim pengelola dana BOS di beberapa SD di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang yaitu persepsi orang tua siswa mampu yang beranggapan bahwa adanya dana BOS berarti tidak ada pembayaran apapun bagi pendidikan putra-putri mereka. Anggapan ini menurunkan peran serta orang tua dalam bentuk dukungan dana sukarela kepada sekolah untuk membiayai beberapa program ekstrakurikuler dan pengembangan diri siswa yang belum terealisasi melalui dana BOS. Hal ini terkait pelaksanaan dan pengelolaan biaya pendidikan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan standar pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar pembiayaan pendidikan oleh kepala Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi standar pembiayaan pendidikan di SD serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan standar pembiayaan pendidikan di SD di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Metode yang digunakan yaitu melalui survei di beberapa SD di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Sungai raya, SDN 14 Persak, SDN 2 Sungai Keran, SDN 16 Batu Payung, SDN 6 Pulau Lemukutan , dan SDN 11 Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala SD Negeri se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Jumlah SD Negeri di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang sebanyak 17 sekolah. Populasi dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan pada akreditasi sekolah. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari sembilan sekolah terakreditasi B, dua sekolah terakreditasi C, dan enam sekolah belum terakreditasi. Sampel dalam penelitian ini diambil enam sekolah dengan tingkatan yang berbeda.

Teknik sampling yang digunakan yaitu dengan teknik *purposive-stratified random sampling*. Sampel diambil dari dua sekolah yang memiliki akreditasi B, dua sekolah yang memiliki akreditasi C, dan dua sekolah yang belum terakreditasi. Hal ini bertujuan agar diperoleh gambaran tentang pelaksanaan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan standar pembiayaan pendidikan di SD yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner/angket, analisis dokumen, dan wawancara. Angket digunakan untuk memperoleh data dari kepala SD Negeri yang menjadi responden. Angket ini digunakan untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan standar pembiayaan pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang berupa tulisan, arsip, agenda dan dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan standar pembiayaan pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang berhubungan dengan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan standar pembiayaan pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Wawancara dilakukan kepada kepala SD Negeri yang menjadi responden.

Keabsahan data dalam penilain ini diuji dengan menggunakan uji kredibilitas. Teknik yang digunakan yaitu dengan triangulasi metode/teknik pengumpulan data. Triangulasi metode/teknik dilakukan dengan membandingkan hasil angket, dokumentasi, dan wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis data angket dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Tahap Analisis data dalam penelitian ini yaitu melakukan tabulasi semua data dari angket dan menghitung skor total. Data angket yang berupa skor tersebut kemudian dikonversi menjadi skala empat.

Analisis data hasil telaah dokumen dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Tahap Analisis data dalam penelitian ini yaitu melakukan tabulasi semua data dan menghitung skor total. Data angket yang berupa skor tersebut kemudian dikonversi menjadi skala empat. Tahap analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan disajikan dalam bentuk narasi, kemudian data hasil dari pengumpulan data direduksi dan dirangkum sehingga menemukan tema-tema dan pola pokok yang relevan dengan penelitian. Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen yang dianalisis bersamaan dengan proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan adalah semua jenis pengeluaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, pengelolaan biaya pendidikan pada tiap satuan pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan baik. Pengelolaan biaya

pendidikan ini harus mengacu pada standar pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BNSP. Standar Pembiayaan adalah standar yang membiayai proses belajar mengajar siswa selama satu tahun. Setiap satuan pendidikan harus memenuhi standar pembiayaan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik.

1. SDN 01 Sungai Raya

a. Penyusunan program pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa perencanaan/penyusunan program pembiayaan pendidikan di SDN 01 Sungai Raya sudah berjalan dengan baik. Sekolah setiap awal tahun ajaran selalu menyusun RKAS dan RAPBS dengan melibatkan *stakeholders* sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU. Masyarakat belum terlibat dalam penyusunan RKAS dan RAPBS. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. SDN 01 Sungai Raya juga memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS dan RAPBS selama 4 tahun terakhir secara berturut-turut. Anggaran dalam RAPBS disusun berdasarkan skala prioritas terutama digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun. Perencanaan/penyusunan program pembiayaan merupakan kegiatan menyusun garis-garis besar yang luas tentang hal-hal yang akan dikerjakan dan cara-cara mengerjakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan ini dilakukan setiap awal tahun/awal ajaran baru yang dituangkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (RABS). Tujuan penyusunan anggaran ini di samping sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang-uang yang diterima. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan RAPBS yaitu masih rendahnya peran serta masyarakat/perusahaan/BUMN disekitar lokasi sekolah dalam pembiayaan pendidikan.

b. Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan

Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 01 Sungai Raya dilakukan berdasarkan RKAS dan RAPBS yang telah disusun. Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 01 Sungai Raya sudah berjalan dengan baik. SDN 01 Sungai Raya telah melaksanakan anggaran pendidikan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang tersenggaranya pembelajaran pada tahun berjalan. Sekolah telah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan gurusekitar 80-90% dari dana yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. Sekolah telah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan karyawansekitar 80-90% dari dana yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. Sekolah mengalokasikan dan membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti: pengadaan alat peraga, buku teks, CD pembelajaran, pengadaan modul, kamus, globe, peta, ensiklopedi, selama tiga tahun terakhir sebesar 75% dari dana yang dialokasikan. Sekolah membelanjakan

biaya untuk kegiatan kesiswaan seperti: kepramukaan, OSIS, dan UKS sebesar 65% dari dana yang dialokasikan bidang kesiswaan dalam tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran, seperti: pensil, penghapus, pena, penggaris, stapler, kertas, buku administrasi, penggandaan, foto copy, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan alat dan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran seperti: bahan praktikum, tinta, kapur, untuk kebersihan, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya kegiatan rapat untuk kegiatan pembelajaran seperti: rapat PPDB, rapat evaluasi semesteran, rapat kenaikan kelas, rapat rapat kelulusan, rapat wali murid, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya transport dan perjalanan dinas seperti untuk kepala sekolah/wakil, guru, dan tenaga kependidikan lain dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ujian untuk ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian kenaikan kelas, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa seperti: listrik dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Setiap sekolah wajib membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, angket dan telaah dokumen buku kas dan SPJ terlihat bahwa laporan pengelolaan program pembiayaan di SDN 01 Sungai Raya sudah dilakukan dengan baik. SDN 01 Sungai Raya telah pengelolaan biaya operasional dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Sekolah telah membuat pembukuan pengelolaan biaya operasional yang dibuktikan dengan dimilikinya RKAS yang memuat pembukuan biaya operasi secara rinci selama tiga tahun terakhir. Sekolah juga membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah baik kepada pemerintah maupun orang tua siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan bukti penyampaian laporan kepada pemerintah dan orang tua siswa tiap akhir tahun atau awal ajaran baru.

2. SDN 02 Sungai Keran

a. Penyusunan program pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa perencanaan/penyusunan program pembiayaan pendidikan di SDN 02 Sungai Keran sudah berjalan dengan baik. Sekolah setiap awal tahun ajaran selalu menyusun RKAS dan RAPBS dengan melibatkan *stakeholders* sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU. Masyarakat belum terlibat dalam penyusunan RKAS dan RAPBS. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. SDN 02 Sungai Keran juga memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS dan RAPBS selama 4 tahun terakhir secara berturut-turut. Anggaran dalam RAPBS disusun berdasarkan skala prioritas terutama digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun. Perencanaan/penyusunan program pembiayaan merupakan kegiatan menyusun garis-garis besar yang luas tentang hal-hal yang akan dikerjakan dan

cara-cara mengerjakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan ini dilakukan setiap awal tahun/awal ajaran baru yang dituangkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (RABS). Tujuan penyusunan anggaran ini di samping sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang-uang yang diterima. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan RAPBS yaitu masih rendahnya peran serta masyarakat/perusahaan/BUMN disekitar lokasi sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang dikelola hampir seluruhnya berasal dari pemerintah yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu, pengelola biaya pendidikan dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara belum mendapatkan pelatihan khusus tentang pengelolaan biaya pendidikan.

b. Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan

Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 02 Sungai Keran dilakukan berdasarkan RKAS dan RAPBS yang telah disusun. Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 02 Sungai Keran sudah berjalan dengan baik. SDN 02 Sungai Keran telah melaksanakan anggaran pendidikan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang tersenggaranya pembelajaran pada tahun berjalan. Sekolah telah membayar gaji, insentif, dan transport gurusekitar 80% dari dana yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. Sekolah telah membayar gaji, insentif, dan transport karyawansekitar 80% dari dana yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. Sekolah mengalokasikan dan membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti: pengadaan alat peraga, buku teks, pengadaan modul, kamus, globe, peta, ensiklopedi, selama tiga tahun terakhir sebesar 80% dari dana yang dialokasikan. Sekolah membelanjakan biaya untuk kegiatan kesiswaan seperti: kepramukaan, OSIS, dan UKS sebesar 60% dari dana yang dialokasikan bidang kesiswaan dalam tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran, seperti: pensil, penghapus, pena, penggaris, stapler, kertas, buku administrasi, penggandaan, foto copy, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan alat dan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran seperti: bahan praktikum, tinta, kapur, untuk kebersihan, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya kegiatan rapat untuk kegiatan pembelajaran seperti: rapat PPDB, rapat evaluasi semesteran, rapat kenaikan kelas, rapat rapat kelulusan, rapat wali murid, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya transport dan perjalanan dinas seperti untuk: kepala sekolah/wakil dan guru sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ujian untuk ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian kenaikan kelas, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa seperti listrik dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah memiliki catatan

dokumen tahunan berupa dokumen nilai aset investasi sarpras dengan kelengkapan mencapai sekitar 75% dalam tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang berasal dari beberapa sumber pendanaan, dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 90% dalam tahun terakhir. Sekolah memiliki modal kerja tetap untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir dan tertuang dalam RKAS.

c. Pelaporan Pengelolaan Program Pembiayaan

Setiap sekolah wajib membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, angket dan telaah dokumen buku kas dan SPJ terlihat bahwapelaporan pengelolaan program pembiayaan di SDN 02 Sungai Keran sudah dilakukan dengan baik. SDN 02 Sungai Keran telah melakukan pengelolaan biaya operasional secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Sekolah telah membuat pembukuan pengelolaan biaya operasional yang dibuktikan dengan dimilikinya RKAS yang memuat pembukuan biaya operasi secara rinci selama tiga tahun terakhir. Sekolah juga membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah baik kepada pemerintah maupun orang tua siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan bukti penyampaian laporan kepada pemerintah dan orang tua siswa tiap akhir tahun atau awal ajaran baru.

3. SDN 06 Pulau Lemukutan

a. Penyusunan program pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa perencanaan/penyusunan program pembiayaan pendidikan di SDN 06 Pulau Lemukutan belum berjalan dengan baik/belum sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Sekolah setiap awal tahun ajaran selalu menyusun RKAS dan RAPBS tetapi belum melibatkan seluruh *stakeholders*. *Stakeholders* sekolah yang dilibatkan meliputi kepala sekolah, bendahara dan guru. Komite dan masyarakat belum terlibat dalam penyusunan RKAS dan RAPBS. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Komite sekolah kurang berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 06 Pulau Lemukutan. SDN 06 Pulau Lemukutan sudah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS dan RAPBS selama 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Tujuan penyusunan anggaran ini di samping sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang-uang yang diterima. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi

kebutuhan sekolah secara optimal. Besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Kendala yang dihadapi dalam penyusunan RAPBS yaitu masih rendahnya peran serta masyarakat/perusahaan/BUMN disekitar lokasi sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang dikelola hampir seluruhnya berasal dari pemerintah yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu, pengelola biaya pendidikan dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara belum mendapatkan pelatihan khusus tentang pengelolaan biaya pendidikan. SDN 06 Pulau Lemukutan belum terakreditasi sehingga pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan

Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 06 Pulau Lemukutan dilakukan berdasarkan RKAS dan RAPBS yang telah disusun. Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 06 Pulau Lemukutan sudah berjalan dengan baik. SDN 06 Pulau Lemukutan telah melaksanakan anggaran pendidikan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang tersenggaranya pembelajaran pada tahun berjalan. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan alat dan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran seperti: bahan praktikum, tinta, kapur, untuk kebersihan, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya kegiatan rapat untuk kegiatan pembelajaran seperti: rapat PPDB, rapat evaluasi semesteran, rapat kenaikan kelas, rapat rapat kelulusan, rapat wali murid, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya transport dan perjalanan dinas seperti untuk: kepala sekolah/wakil dan guru sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ujian untuk ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian kenaikan kelas, dll sebesar 70% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa seperti listrik dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah menetapkan uang sekolah (iuran bulanan) dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa dan dalam tahun terakhir, diperoleh data bahwa 70% orang tua siswa SDN 06 Pulau Lemukutan mampu membayar uang sekolah. Sekolah juga telah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu, misalnya pembebasan SPP dan pemberian beasiswa kepada semua siswa kurang mampu. Sekolah memiliki catatan dokumen tahunan berupa dokumen nilai aset investasi sarpras dengan kelengkapan mencapai sekitar 60% dalam tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang berasal dari beberapa sumber pendanaan, dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 75% dalam tahun terakhir. Sekolah memiliki modal kerja tetap untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir dan tertuang dalam RKAS.

c. Pelaporan Pengelolaan Program Pembiayaan

Setiap sekolah wajib membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, angket dan telaah dokumen buku kas dan SPJ terlihat bahwa pelaporan pengelolaan program pembiayaan di SDN 06 Pulau Lemukutan sudah dilakukan dengan baik. SDN 06 Pulau Lemukutan telah melakukan pengelolaan biaya operasional secara transparan dan akuntabel. Sekolah telah membuat pembukuan pengelolaan biaya operasional yang dibuktikan dengan dimilikinya RKAS yang memuat pembukuan biaya operasi secara rinci selama tiga tahun terakhir. Sekolah juga membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah baik kepada pemerintah maupun orang tua siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan bukti penyampaian laporan kepada pemerintah dan orang tua siswa tiap akhir tahun atau awal ajaran baru.

4. SDN 11 Sungai Raya

a. Penyusunan program pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa perencanaan/penyusunan program pembiayaan pendidikan di SDN 11 Sungai Raya belum berjalan dengan baik/belum sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Sekolah setiap awal tahun ajaran telah menyusun RKAS dan RAPBS tetapi belum melibatkan seluruh *stakeholders*. *Stakeholders* sekolah yang dilibatkan meliputi kepala sekolah, bendahara dan guru. Komite dan masyarakat belum terlibat dalam penyusunan RKAS dan RAPBS. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Komite sekolah kurang berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 11 Sungai Raya. SDN 11 Sungai Raya sudah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS dan RAPBS selama 2 tahun terakhir secara berturut-turut tetapi masih belum lengkap dan masih perlu dilakukan penyempurnaan. Anggaran dalam RAPBS disusun berdasarkan skala prioritas terutama digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Kendala yang dihadapi dalam penyusunan RAPBS yaitu masih rendahnya peran serta masyarakat/perusahaan/BUMN disekitar lokasi sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang dikelola hampir seluruhnya berasal dari pemerintah yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu, pengelola biaya pendidikan dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara belum mendapatkan pelatihan khusus tentang pengelolaan biaya pendidikan. SDN 11 Sungai Raya belum terakreditasi sehingga pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan

Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 11 Sungai Raya dilakukan berdasarkan RKAS dan RAPBS yang telah disusun. Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 11 Sungai Raya belum berjalan dengan baik/belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sekolah membayar gaji, insentif, dan transport gurusekitar 80% dari dana yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. Sekolah telah membayar gaji, insentif, dan transport karyawansekitar 80% dari dana yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang berasal dari beberapa sumber pendanaan, dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 60% dalam tahun terakhir. Sekolah memiliki modal kerja tetap yang minim untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir dan tertuang dalam RKAS.

c. Pelaporan Pengelolaan Program Pembiayaan

Setiap sekolah wajib membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, angket dan telaah dokumen buku kas dan SPJ terlihat bahwa pelaporan pengelolaan program pembiayaan di SDN 11 Sungai Raya sudah dilakukan dengan cukup baik. SDN 11 Sungai Raya telah melakukan pengelolaan biaya operasional secara transparan dan akuntabel. Sekolah telah membuat pembukuan pengelolaan biaya operasional yang dibuktikan dengan dimilikinya RKAS yang memuat pembukuan biaya operasi secara rinci selama dua tahun terakhir. Sekolah juga membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah kepada pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan bukti penyampaian laporan kepada pemerintah tiap akhir tahun.

5. SDN 14 Peresak

a. Penyusunan program pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa perencanaan/penyusunan program pembiayaan pendidikan di SDN 14 Peresak sudah berjalan dengan baik. Sekolah setiap awal tahun ajaran selalu menyusun RKAS dan RAPBS dengan melibatkan *stakeholders* sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU. Masyarakat belum terlibat dalam penyusunan RKAS dan RAPBS. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. SDN 14 Peresak juga memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS dan RAPBS selama 4 tahun terakhir secara berturut-turut. Anggaran dalam RAPBS disusun berdasarkan skala prioritas terutama digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun. Perencanaan/penyusunan program pembiayaan merupakan kegiatan menyusun garis-garis besar yang luas tentang hal-hal yang akan dikerjakan dan cara-cara mengerjakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan ini dilakukan setiap awal tahun/awal ajaran baru yang dituangkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (RABS). Tujuan penyusunan anggaran ini di samping sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatasan dan

pertanggungjawaban sekolah terhadap uang-uang yang diterima. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.

b. Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan

Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 14 Peresak dilakukan berdasarkan RKAS dan RAPBS yang telah disusun. Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 14 Peresak sudah berjalan dengan baik. SDN 14 Peresak telah melaksanakan anggaran pendidikan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang tersenggaranya pembelajaran pada tahun berjalan. Sekolah telah membayar gaji, insentif, dan transport gurusekitar 80% dari dana yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. Sekolah telah membayar gaji, insentif, dan transport karyawansekitar 80% dari dana yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. Sekolah mengalokasikan dan membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti: pengadaan alat peraga, buku teks, pengadaan modul, kamus, globe, peta, ensiklopedi, selama tiga tahun terakhir sebesar 80% dari dana yang dialokasikan. Sekolah membelanjakan biaya untuk kegiatan kesiswaan seperti: kepramukaan, OSIS, dan UKS sebesar 60% dari dana yang dialokasikan bidang kesiswaan dalam tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran, seperti: pensil, penghapus, pena, penggaris, stapler, kertas, buku administrasi, penggandaan, foto copy, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan alat dan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran seperti: bahan praktikum, tinta, kapur, untuk kebersihan, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya kegiatan rapat untuk kegiatan pembelajaran seperti: rapat PPDB, rapat evaluasi semesteran, rapat kenaikan kelas, rapat rapat kelulusan, rapat wali murid, dll sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya transport dan perjalanan dinas seperti untuk: kepala sekolah/wakil dan guru sebesar 75% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ujian untuk ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian kenaikan kelas, dll sebesar 70% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa seperti listrik dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang berasal dari beberapa sumber pendanaan, dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 90% dalam tahun terakhir. Sekolah memiliki modal kerja

tetap untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir dan tertuang dalam RKAS.

c. Pelaporan Pengeloaan Program Pembiayaan

Setiap sekolah wajib membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, angket dan telaah dokumen buku kas dan SPJ terlihat bahwa pelaporan pengeloaan program pembiayaan di SDN 14 Peresak sudah dilakukan dengan baik. SDN 14 Peresak telah melakukan pengelolaan biaya operasional secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Sekolah telah membuat pembukuan pengelolaan biaya operasional yang dibuktikan dengan dimilikinya RKAS yang memuat pembukuan biaya operasi secara rinci selama tiga tahun terakhir. Sekolah juga membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah baik kepada pemerintah maupun orang tua siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan bukti penyampaian laporan kepada pemerintah dan orang tua siswa tiap akhir tahun atau awal ajaran baru.

6. SDN 16 Batu Payung

a. Penyusunan program pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa perencanaan/penyusunan program pembiayaan pendidikan di SDN 16 Batu Payung belum berjalan dengan baik/belum sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Sekolah setiap awal tahun ajaran telah menyusun RKAS dan RAPBS tetapi belum melibatkan seluruh *stakeholders*. *Stakeholders* sekolah yang dilibatkan meliputi kepala sekolah, bendahara dan guru. Komite dan masyarakat belum terlibat dalam penyusunan RKAS dan RAPBS. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Komite sekolah kurang berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 16 Batu Payung. SDN 16 Batu Payung sudah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS dan RAPBS selama 2 tahun terakhir secara berturut-turut tetapi masih belum lengkap dan masih perlu dilakukan penyempurnaan. Anggaran dalam RAPBS disusun berdasarkan skala prioritas terutama digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Kendala yang dihadapi dalam penyusunan RAPBS yaitu masih rendahnya peran serta masyarakat/perusahaan/BUMN disekitar lokasi sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang dikelola hampir seluruhnya berasal dari pemerintah yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu, pengelola biaya pendidikan dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara belum mendapatkan pelatihan khusus tentang pengelolaan biaya pendidikan.

b. Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan

Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 16 Batu Payung dilakukan berdasarkan RKAS dan RAPBS yang telah disusun. Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan telaah dokumen terungkap bahwa pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 16 Batu Payung Raya belum berjalan dengan baik/belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sekolah membayar gaji, insentif, dan transport gurusekitar 80% dari dana yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. Sekolah telah membayar gaji, insentif, dan transport karyawansekitar 80% dari dana yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. Sekolah mengalokasikan dan membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti: pengadaan alat peraga, buku teks, pengadaan modul, kamus, globe, peta selama tiga tahun terakhir sebesar 55% dari dana yang dialokasikan. Sekolah membelanjakan biaya untuk kegiatan kesiswaan seperti kepramukaan, OSIS, dan UKS sebesar 60% dari dana yang dialokasikan bidang kesiswaan dalam tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran, seperti: pensil, penghapus, pena, penggaris, stapler, kertas, buku administrasi, penggandaan, foto copy, dll sebesar 70% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan alat dan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran seperti: bahan praktikum, tinta, kapur, untuk kebersihan, dll sebesar 70% dari dana yang dialokasikan pada tahun terakhir. Sekolah membelanjakan biaya untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung seperti uang lembur dan konsumsi sebesar 75% dari dana yang dialokasikan selama tiga tahun terakhir. Sekolah menggunakan sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat/komite sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan baik berupa sumbangan, infaq, dan bantuan lain dan juga bantuan dari pemerintah (pusat dan daerah) dalam tahun terakhir dilakukan secara transparan, tanggungjawab, dan dilaporkan kepada masyarakat/komite sekolah dalam tahun terakhir. Sekolah menetapkan uang sekolah (iuran bulanan) dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa dan dalam tahun terakhir, diperoleh data bahwa 70% orang tua siswa SDN 16 Batu Payung mampu membayar uang sekolah. Sekolah memiliki catatan dokumen tahunan berupa dokumen nilai aset investasi sarpras dengan kelengkapan mencapai sekitar 50% dalam tahun terakhir. Sekolah memiliki modal kerja tetap yang minim untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir dan tertuang dalam RKAS.

c. Pelaporan Pengelolaan Program Pembiayaan

Setiap sekolah wajib membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, angket dan telaah dokumen buku kas dan SPJ terlihat bahwa pelaporan pengelolaan program pembiayaan di SDN 16 Batu Payung sudah dilakukan dengan cukup baik. SDN 16 Batu Payung telah melakukan pengelolaan biaya operasional secara transparan dan akuntabel. Sekolah telah membuat pembukuan pengelolaan biaya operasional yang dibuktikan dengan dimilikinya RKAS yang memuat pembukuan biaya operasi secara rinci selama dua tahun terakhir. Sekolah juga membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah kepada pemerintah. Hal ini

dibuktikan dengan adanya dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan bukti penyampaian laporan kepada pemerintah tiap akhir tahun.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan standar pembiayaan pendidikan yang dilakukan di beberapa SD di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dapat disimpulkan bahwa penyusunan program pembiayaan pendidikan pada tiga sekolah yang telah terakreditasi yaitu SDN 01 Sungai Raya, SDN 02 Sungai Keran, dan SDN14 Peresak sudah berjalan dengan baik/sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pada tigasekolah yaitu SDN 06 Pulau Lemukutan, SDN 11 Sungai Raya, dan SDN 16 Batu Payung memiliki kategori cukup. Pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 01 Sungai Raya, SDN 02 Sungai Keran, SDN 14 Peresak, SDN 06 Pulau Lemukutan dan SDN 16 Batu Payung memiliki kategori “Baik”, sedangkan di SDN 11 Sungai Raya memiliki kategori “Cukup”. Pelaporan pengelolaan program pembiayaan di SDN 01 Sungai Raya, SDN 02 Sungai Keran, SDN 14 Peresak, dan SDN 06 Pulau Lemukutan memiliki kategori “Baik”. SDN 11 Sungai Raya dan SDN 16 Batu Payung memiliki kategori “Cukup”.

Kendala yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan biaya pendidikan yaitu belum berjalannya manajemen berbasis sekolah (MBS), Komite sekolah kurang berperan aktif dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, sehingga menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Saran

Pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik melalui manajemen berbasis sekolah yang baik. Pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu dilakukan dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, TU, komite, dan masyarakat. Dinas pendidikan diharapkan proaktif memerikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus dilakukan melalui pelatihan pada kepala sekolah, bendahara, dan tenaga kependidikan lainnya yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. (2005). Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Depdiknas. (2008). Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

- Fattah, Nanang. (1999). Analisis hubungan pembiayaan pendidikan dasar dengan mutu proses dan hasil belajar. *Jurnal Mimbar Pendidikan*, 1 (3), pp 51-56
- Supriadi, Dedi. (2006). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Syamsudin. (2009). Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Asahan. Tesis Magister, Universitas sumatra Utara. Medan